



DINAMIKA GOVERNANCE

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Strategi Kebijakan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung

Tita Novita

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Indonesia

*Email Corresponding: titanovita011179@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 1 September 2026

Revised date: 13 Oktober 2026

Accepted date: 14 Oktober 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i3.6133>



This article is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
[International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT

The Lampung Provincial Government faces a major challenge in improving human resource quality, with stunting being a key issue. Although convergence actions for accelerated stunting reduction have been implemented, they have not yet yielded maximum results in lowering stunting prevalence. This policy paper employs a qualitative descriptive approach to examine the factors influencing the suboptimal implementation of convergence actions for stunting prevention and accelerated reduction in Lampung Province. Data were gathered through questionnaires as primary data, alongside secondary data from the Web Aksi Bangda evaluation, previous journals, and other relevant documents. The analysis results indicate that the primary issue is the suboptimal implementation of convergence actions for stunting prevention and accelerated reduction, driven by weak cross-sectoral coordination and a lack of commitment from policymakers. The formulated policy recommendations suggest that the Lampung Provincial Government issue regulations on the implementation of stunting prevention and accelerated reduction convergence actions. These regulations should govern provincial stunting prevalence targets, the enhancement of commitment and coordination through the strengthening of the Stunting Reduction Acceleration Team (TP3S), the reinforcement of the sub-district (kecamatan) role, and the optimized utilization of the Web Aksi Konvergensi Bangda as a synergy tool between sub-district, district/city, and provincial governments. These efforts are expected to optimize the implementation of convergence actions and provide leverage to accelerate the reduction of stunting prevalence in Lampung Province.

Keyword: Policies, Convergence Initiatives, Prevention, and Accelerating the Reduction of Stunting.

ABSTRAKSI

Pemerintah Provinsi Lampung menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, salah satunya adalah stunting. Meskipun aksi konvergensi percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan, namun belum memberikan hasil yang maksimal dalam penurunan prevalensi stunting. Policy paper ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung. Data diperoleh melalui kuisioner sebagai data primer dan evaluasi web aksi bangda, jurnal terdahulu maupun dokumen lain sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah belum optimal pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dikarenakan lemahnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya komitmen pengampu kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan: Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan regulasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang mengatur tentang target prevalensi stunting provinsi, peningkatan komitmen dan koordinasi melalui penguatan TPPPS, Penguatan peran kecamatan serta penguatan pemanfaatan web aksi konvergensi bangda sebagai tools/alat sinergi antara pemerintah kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan aksi konvergensi dan memberikan daya ungkit untuk penurunan prevalensi stunting di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Kebijakan, Aksi Konvergensi, Pencegahan dan percepatan Penurunan stunting.

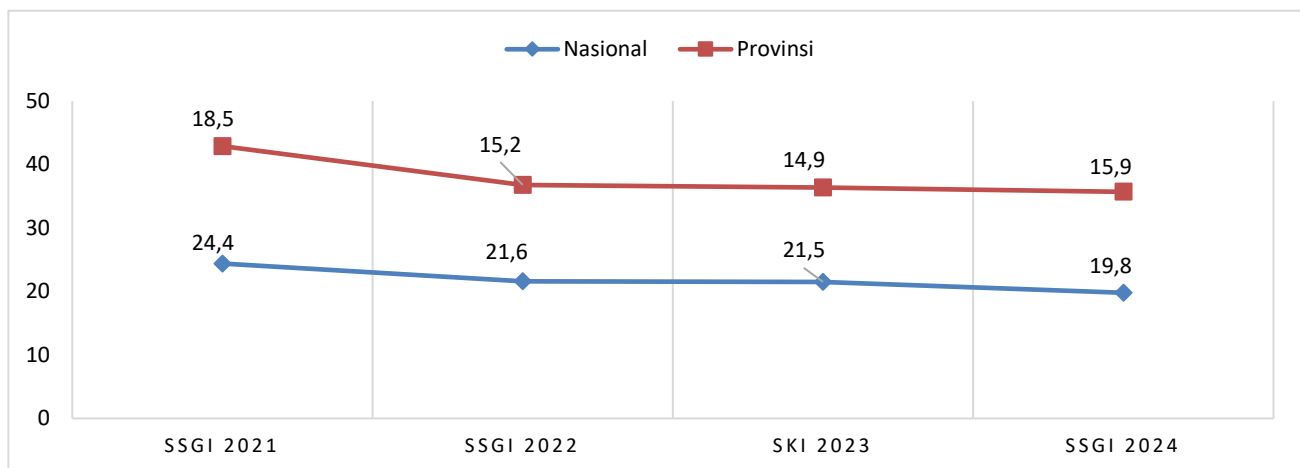
PENDAHULUAN

Stunting merupakan isu multidimensi yang secara langsung mengancam kualitas sumberdaya manusia (Amran et al., 2024). Dampaknya bersifat jangka panjang, tidak hanya terbatas pada masalah fisik tetapi juga memicu penurunan kapasitas kognitif, merosotnya produktivitas ekonomi serta meningkatnya beban biaya kesehatan yang ditanggung negara. Stunting menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sri Widari, Nasri Bachtiar, 2025), khususnya pada tujuan ke-2 mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan, yang erat kaitannya dengan tujuan ke-3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di segala usia (Nirmalasari, 2025).

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, Prevalensi stunting di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 1 % dari tahun 2023, yaitu dari 14,9% (SKI 2023) menjadi 15,9 % (SSGI 2024). Bila dilihat dari jumlah balita stunting peningkat prevalensi stunting sebesar 1 (satu) % di tahun 2024, memiliki selisih jumlah balita stunting sebanyak 9.407 balita dibanding tahun 2023, sehingga jumlah balita stunting Provinsi Lampung di tahun 2024 sebesar 126,888 balita (Triani et al., 2026).

Grafik Angka Prevalensi Stunting Provinsi Lampung dan Nasional

Tahun 2021-2024



Sumber : SSGI Tahun 2021, 2022, 2024 dan SKI 2023

Beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan prevalensi stunting dari tahun sebelumnya, diantaranya Tanggamus, Pesibar, Pringsewu, Balam, Tubaba, Lamsel, Pesawaran, Tuba, Metro, Mesuji. Disparitas angka prevalensi stunting antar Kabupaten/Kota masih tampak terlihat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, seluruh pemerintah daerah telah menggunakan desain 8 aksi konvergensi sebagai instrumen dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi (Sumantri, Rahmat, 2023). Namun berjalannya waktu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Bina Bangsa Kemendagri, bahwa aksi konvergensi tersebut belum berdampak banyak dalam penurunan prevalensi stunting. Hal ini dikarenakan beberapa intervensi dilaksanakan belum tepat sasaran, kurangnya komitmen pimpinan daerah, layanan intervensi yang berjalan sendiri-sendiri dan Indikator layanan yang berbeda-beda untuk setiap wilayah sehingga pada tahun 2025. berdasarkan surat edaran Kemendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda, pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting (PPS) berganti menjadi aksi Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting (PPPS) yang ditekankan pada proses identifikasi sasaran, capaian layanan dan prioritas intervensi oleh Pemerintah kecamatan yang kemudian diselaraskan dengan rencana kegiatan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan aksi konvergensi terbaru tersebut, namun berdasarkan hasil monitoring semester II 2025, pelaksanaan aksi konvergensi masih berada pada kategori sedang (83,5 persen)

dari target 100 persen (Laporan Dashboard Web aksi Bangda per-desember 2025).

Tabel Prevalensi Stunting Per-Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 - 2024

KABUPATEN/KOTA	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	SSGI 2024	selisih
Lampung Barat	22,7	16,6	24,6	20,5	-4,1
Lampung Utara	20,2	24,7	23,5	20	-3,5
Way kanan	20,7	18,4	22,7	13,9	-8,8
Tanggamus	25	20,4	17,1	24,9	7,8
Lampung Tengah	20,8	8,7	16,7	15,5	-1,2
Pesisir Barat	22,8	16,7	16,1	19,8	3,7
Pringsewu	19	16,2	15,8	19,5	3,7
Lampung Timur	15,3	18,1	14,2	14	-0,2
Bandar Lampung	19,4	11,1	13,4	14,8	1,4
Tulang bawang barat	22,1	16,4	10,5	13,4	2,9
Lampung Selatan	16,3	9,9	10,3	10,4	0,1
Pesawaran	17,6	25,1	10	15,5	5,5
Tulang Bawang	9,5	10,2	9,8	18,3	8,5
Metro	19,7	10,4	7,1	14,8	7,7
Mesuji	21,8	22,5	5	11,1	6,1
Provinsi	18,5	15,2	14,9	15,9	1

Sumber : SSGI Tahun 2021, 2022, 2024 dan SKI 2023.

Hal ini disebabkan karena keterlibatan kecamatan, sebagai unit pemerintahan yang dapat mengidentifikasi penyebab masalah stunting dan akses langsung masyarakat masih sangat kurang, selain itu proses perencanaan dan penganggaran yang belum sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/Kota dan Kecamatan-desa.

Belum tercapainya target penurunan prevalensi stunting dan rendahnya capaian pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung menjadi isu yang cukup krusial, mengingat penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas nasional untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kondisi diatas mencerminkan masih adanya tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penentuan masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) maka masalah utama yang dikaji pada penelitian ini ini adalah belum optimalisasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting (PPPS) di Provinsi Lampung. selanjutnya dilakukan breakdown penyebab masalah setiap level yang terdiri dari : a) Penyebab Masalah Level 1 : a. Rendahnya sinergi lintas sektor dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting (Tien Mastina,2023), b. Kurangnya dukungan anggaran untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting (Laporan Kemenko PMK pada Rakornas Percepatan Penurunan stunting tahun 2024), c. Pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan stunting belum terintegrasi secara maksimal kedalam proses dan dokumen perencanaan dan Penganggaran (Laporan TPPS Provinsi Lampung 2025); b) Penyebab Masalah Level 2 : a. Kurangnya Komitmen Pengampu kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan stunting (Fatmaningrum et al, 2022), b. Kurangnya forum rutin atau koordinasi aktif dalam pelaksanaan program stunting (TP2S, Kemensetneg RI, 2025), c. Pemanfaatan web aksi bangda sebagai Tools/alat sinergi dan koordinasi antar wilayah belum digunakan secara maksimal (Hasil monitoring Web aksi Konvergensi Bangda), d. Anggapan bahwa menangani stunting hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan (Laporan Kemenko PMK pada Rakornas Percepatan Penurunan stunting tahun 2024), e. Kurangnya ketersediaan data dukung untuk menentukan intervensi layanan (Laporan Kemenko PMK pada Rakornas Percepatan Penurunan stunting tahun

2024), f. Kurangnya dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia pelaksana program stunting (Hasil monitoring Web aksi Konvergensi Bangsa).

Hasil pencermatan masalah saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga diperlukan kebijakan yang sistemik, kolaborasi dan berbasis data untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Lampung. Telah diidentifikasi beberapa akar masalah, maka *problem statement* yang di *highlight* pada penelitian ini adalah ini adalah belum optimalnya pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting disebabkan rendahnya sinergi lintas sektor dan koordinasi antar pemerintah daerah dikarenakan kurangnya komitmen pengampu kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sehingga menyebabkan meningkatnya prevalensi stunting di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, optimalisasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program dan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sinergi lintas sektor serta koordinasi yang efektif pada setiap tingkatan pemerintahan. Komitmen pengampu kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten. Tanpa adanya komitmen yang kuat, koordinasi yang berkelanjutan, dan pembagian peran yang jelas, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif berisiko berjalan secara parsial sehingga tujuan penurunan stunting sulit dicapai secara optimal.

Selain itu, kecamatan dan desa memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan aksi konvergensi karena berhubungan langsung dengan masyarakat serta memiliki pemahaman mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kejadian stunting. Oleh karena itu, keterlibatan kecamatan dan desa perlu diperkuat melalui koordinasi berjenjang, integrasi perencanaan dan penganggaran, pemanfaatan data yang akurat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa diharapkan dapat memastikan bahwa intervensi yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan sasaran dan dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian, aksi konvergensi tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan sumber daya dalam mencapai target penurunan stunting.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung, khususnya terkait rendahnya sinergi lintas sektor dan koordinasi antarlevel pemerintahan yang dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pengampu kebijakan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara komitmen kebijakan, mekanisme koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan aksi konvergensi. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data, sehingga pelaksanaan aksi konvergensi dapat berjalan lebih optimal serta berkontribusi terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung, yang meliputi data primer dan data sekunder (Undari Sulung, 2024), yaitu 1) Data primer, data yang diperoleh dari hasil survey melalui kuesioner yang disebar dan diisi responden untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan terkait tahapan pelaksanaan aksi konvergensi, mulai dari Analisis situasi, tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan dukungan regulasi. Kesesuaian pengisian tahapan dengan timeline, komitmen terkait penganggaran program kegiatan pendukung intervensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan aksi konvergensi dan pemanfaatan laman aksi konvergensi bangsa sebagaimana dituangkan dalam kuisisioner berikut : <https://bit.ly/KuesionerKonvergensiStunting>, 2) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil laman aksi konvergensi bangsa, jurnal terdahulu, juknis maupun dokumen lain yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan

pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung.

Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen (Sri Yayuk, 2019) seperti yang diungkapkan oleh Nazir bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Atmaja, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif (Alfira Damayanti, Isniyunisayfna Diah Delima, 2023) yang menyajikan gambaran pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dalam laman aksi konvergensi bangsa serta faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan aksi konvergensi sehingga berdampak pada angka prevalensi stunting di Provinsi Lampung.

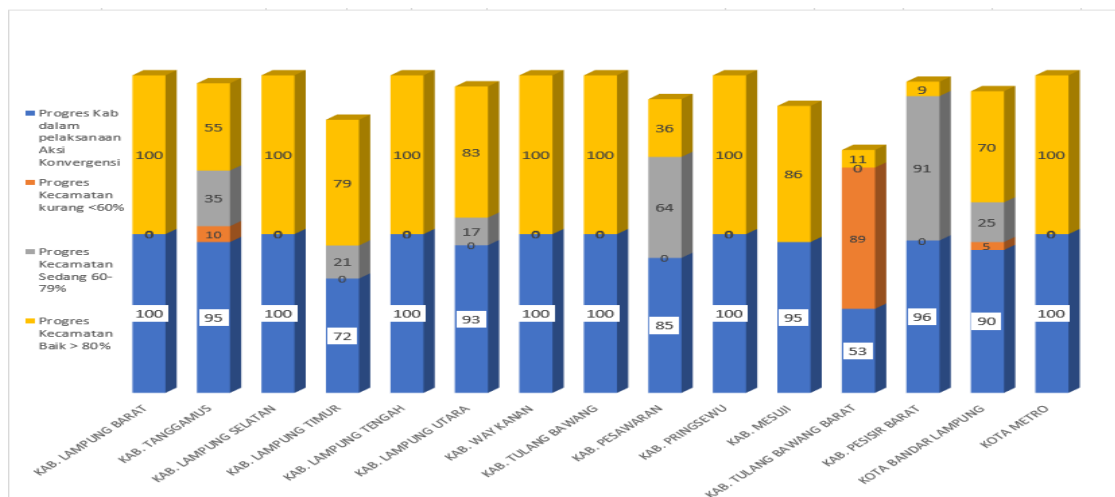
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Provinsi Lampung tahun 2025

Sesuai dengan surat edaran Kemendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda, bahwa pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting (PPPS) berpedoman pada Buku teknis Pelaksanaan aksi Konvergensi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang dikeluarkan oleh Dirjen Bangda Kemendagri RI, maka di tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan aksi konvergensi sesuai dengan tahapan aksi dan bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten/kota serta memanfaatkan dashboard laman aksi bangsa.

Hasil monitoring dan evaluasi laman aksi bangsa, Progres pelaksanaan aksi konvergensi PPPS di Provinsi Lampung tahun 2025 berada pada kategori Baik (97,95%). Progres pelaksanaan aksi konvergensi Provinsi ini, erat kaitannya dengan progres pelaksanaan aksi konvergensi Kabupaten/kota dan kecamatan. Dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 13 kabupaten/kota telah melaksanakan aksi konvergensi PPPS secara baik (87%), 1 Kabupaten dengan progress sedang (7%) dan 1 Kabupaten dengan progres kurang (7%). Sedangkan untuk progres pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan, dari 229 Kecamatan, 179 kecamatan telah melaksanakan aksi konvergensi secara baik (78%), 39 kecamatan status sedang (17%) dan 11 kecamatan status kurang (5%).

Grafik Progres Pelaksanaan Aksi Konvergensi PPPS Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber : Laman aksi Konvergensi Bangsa, 2025.

Untuk dukungan intervensi per kelompok sasaran, keseluruhan anggaran di Provinsi Lampung sebesar Rp. 211.585.986.019.545,-

Tabel Dukungan Intervensi Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2025

Dukungan Intervensi per Kelompok Sasaran				
Kelompok	Jumlah Indikator	Jumlah Kegiatan	Alokasi Dana	OPD
RTM	6	34	Rp 128.744.654.806.953	8
Balita	5	6	Rp 64.876.554.059.149	2
Rematri	2	5	Rp 6.292.121.240.770	2
Ibu Hamil	4	10	Rp 5.754.557.248.503	3
Baduta	8	11	Rp 5.250.557.021.627	2
Catin	2	3	Rp 667.541.642.543	2

Dukungan Tertinggi
RTM
Rp 128.744.654.806.953

Dukungan Terendah
Catin
Rp 667.541.642.543

Perhatian
Kelompok **Rematri** merupakan fokus intervensi provinsi, namun memiliki dukungan kegiatan, anggaran, dan OPD yang relatif rendah.

Sumber : Laman aksi Konvergensi Bangsa, 2025.

Berdasarkan kondisi progres pelaksanaan aksi konvergensi PPPS dan dukungan anggaran diatas, berdampak pada nilai/score dari aksi konvergensi konvergensi untuk masing-masing wilayah.

Tabel Score/Nilai Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Score/Nilai Konvergensi PPPS
Lampung Barat	15	89,86
Tanggamus	20	80,13
Lampung Selatan	17	83,69
Lampung Timur	24	61,52
Lampung Tengah	28	87,01
Lampung Utara	23	81,93
Way Kanan	15	90,2
Tulangbawang	15	86,44
Pesawaran	11	73,86
Pringsewu	9	95,83
Mesuji	7	81
Tulang Bawang Barat	9	76,94
Pesisir Barat	11	84,25
Kota Bandar Lampung	20	83,57
Kota Metro	5	94,88
Lampung	229	83,58

Sumber : Laman Aksi Konvergensi Bangsa, 2025.

Berdasarkan skor/nilai aksi konvergensi PPPS tahun 2025, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang memiliki progress pelaksanaan sedang ataupun kurang akan masuk kedalam klasifikasi pelaksanaan aksi konvergensi yang perlu dioptimalkan.

2. Hasil Survey terkait Pelaksanaan Aksi Konvergensi PPPS dan Pemanfaatan Web Aksi Konvergensi Bangda di Provinsi Lampung

Survey bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan dan masukan responden terhadap pelaksanaan aksi konvergensi PPPS dan pemanfaatan web aksi Konvergensi Bangda sebagai tools/alat sinergi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam pelaksanaan PPPS di Provinsi Lampung. Survey dilakukan terhadap 15 responden perwakilan dari Bappeda Kabupaten/Kota, 15 responden perwakilan dari Kecamatan dan 12 responden perwakilan dari 12 Perangkat daerah pengampu intervensi stunting di Pemerintah Provinsi Lampung dengan :

1. Karakteristik Responden

Dalam survey ini, responden adalah Penanggung jawab program Stunting pada instansi Bappeda di 15 kabupaten/kota, operator web aksi konvergensi bangda di Kecamatan dan penanggung jawab program stunting di Perangkat daerah Pengampu program stunting di Pemerintah Provinsi Lampung.

1. Lama tugas responden pada program stunting

Mayoritas penanggung jawab program Stunting pada instansi Bappeda memiliki Lama tugas lebih dari 2 tahun, namun untuk operator web aksi konvergensi bangda di Kecamatan sebagian besar memiliki lama tugas kurang dari 1 tahun (60%) karena sering berganti-ganti orang dan untuk lama tugas operator Perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung, sebagian besar memiliki lama tugas 1-2 tahun (70%).

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung, yaitu :

- a) Sebanyak 64,3% responden menjawab bahwa penginputan data sasaran, capaian layanan, data pendukung pada analisis situasi sebagai dasar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran oleh kecamatan belum akurat dan tepat waktu sesuai dengan timeline penginputan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan aksi konvergensi merupakan hal yang baru bagi pemerintah kecamatan dan kecamatan kesulitan dalam mengkoordinasikan pengumpulan data dari Puskesmas, PL KB dan Tim Pendamping Keluarga;
- b) Sebanyak 66,6% responden menjawab bahwa pilihan program kegiatan yang diusulkan pada Pra Musrenbang stunting merupakan hasil dari identifikasi kendala, namun 69% responden menyatakan bahwa pelaksanaan Pra musrenbang stunting tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota di beberapa wilayah tidak dilaksanakan sesuai timelinenya (sesudah musrenbang desa /daerah) sehingga kebijakan usulan prioritas intervensi stunting dalam dokumen perencanaan pembangunan desa maupun daerah belum berdasarkan identifikasi kendala/permasalahan yang ada;
- c) Berdasarkan jawaban 57% responden menyatakan bahwa dukungan anggaran untuk intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah sangat memadai, namun 52% responden yang sebagian besar merupakan operator kecamatan, menyatakan bahwa dukungan anggaran untuk intervensi program stunting di pemerintahan kecamatan masih sangat kurang;
- d) Sebanyak 92,8% responden menyatakan bahwa belum ada regulasi/surat edaran Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan aksi konvergensi stunting yang diterbitkan di awal tahun 2025, hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan yang jelas dari pusat terkait pelaksanaan Aksi Konvergensi (Revisi Perpres 71 tahun 2021 belum terbit) dan surat edaran Kemendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda dan Pedoman teknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi PPPS baru dirilis dibulan Maret 2025;
- e) Berdasarkan jawaban 62% responden, forum koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan stunting (TPPPS) melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan komitmen dan mensinergikan program lintas sektor. Namun ditahun 2025, beberapa kabupaten/kota dan kecamatan tidak melaksanakan koordinasi TPPPS tersebut, dikarenakan SK TPPPS sudah berakhir ditahun 2024 dan SK terbaru belum ada (menunggu

revisi perpres 71 tahun 2021); f) Untuk Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting, berdasarkan 69% responden dilaksanakan dengan melihat pelaksanaan aksi di web aksi konvergensi bangsa dan 30% berkoordinasi langsung dengan pengelola program.

4. Integrasi Pelaksanaan aksi konvergensi PPPS dalam web aksi konvergensi Bangsa

Dalam penggunaan web aksi konvergensi bangsa, 57% responden memahami pemanfaatannya, sedangkan 43% menjawab ragu-ragu. Hal ini dikarenakan adanya transformasi pelaksanaan aksi dan pembaharuan web serta kerumitan alur kerja lintas instansi, serta perlunya ketelitian dalam memasukkan data berbasis indikator. Dalam pemanfaatannya, 80% responden menemukan beberapa kendala, diantaranya kualitas dan jumlah SDM operator yang terbatas ditingkat kecamatan dan puskesmas, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, server yang lambat/down disaat periode puncak/deadline pelaporan nasional, ketidaksesuaian tagging anggaran sub kegiatan, alur pelaporan yang berjenjang (mulai operator, verifikator dan approval) terkadang terkendala karena biasanya dilakukan oleh satu orang.

Berdasarkan hasil survey, 83% responden menyatakan bahwa web aksi konvergensi bangsa mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan sinergi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta meminimalkan tumpang tindih intervensi di lokus yang sama, sehingga tahapan pelaksanaan yang terdapat pada web tersebut, perlu diinput datanya secara lengkap dan sesuai dengan timeline penginputan.

KESIMPULAN

Penurunan angka prevalensi stunting masih menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan stunting (PPPS) merupakan pendekatan program yang terkoordinir, terpadu, dan kolaboratif dari berbagai lintas sektor untuk menysasar kelompok prioritas. Meskipun pelaksanaan aksi konvergensi ini sudah dilaksanakan, namun daya ungkit pada pencapaian penurunan prevalensi stunting masih belum maksimal.

Permasalahan lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya komitmen dan kurangnya pemanfaatan web aksi konvergensi bangsa dalam mensinergikan pelaksanaan aksi secara berjenjang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung.

Dengan menyusun kebijakan yang terpadu yang mengatur pelaksanaan aksi konvergensi PPPS, maka diharapkan tujuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menurunkan angka prevalensi stunting menuju “*New Zerro Stunting*” terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfira Damayanti, Isniyunisafna Diah Delima, A. S. (2023). *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi dan Publikasi (Studi Deskriptif Kualitatif pada Akun Instagram @rumahkimkotatangerang)*. 6(September), 173–190.
- Amran, R., Pratama, R. R., & Wahyuni, S. (2024). *Stunting sebagai Ancaman Kualitas Sumber Daya Manusia : Perspektif Gizi* ., 233–240.
- Atmaja, J. P. (2023). *Peran Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata Di Indonesia*. 11(1), 151–157.
- Nirmalasari, N. O. (2025). *STUNTING PADA ANAK : PENYEBAB DAN FAKTOR RISIKO STUNTING DI INDONESIA*. 14(1), 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>
- Sri Widari, Nasri Bachtar, E. P. (2025). *Faktor Penentu Stunting: Analisis Komparasi Masa Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. 21(3), 1338–1346. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1726>
- Sri Yayuk, S. (2019). *Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dan analisis jalur*. 7(1), 84–96.
- Sumantri, Rahmat, A. D. (2023). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*. 3, 11108–11117.

Triani, R., Djafri, D., Ramadani, M., Epidemiologi, M., Masyarakat, F. K., Andalas, U., Masyarakat, D. K., Masyarakat, F. K., & Padang, K. (2026). *Determinan Tuberkulosis pada Balita di Indonesia (Analisis Data Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024)*. 5(2), 855–865.

<https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v5i2.7598>

Undari Sulung, M. M. (2024). *MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER*. 5(September), 110–116.